

## **Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Peran Efektivitas Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi**

**Bambang Jatmiko<sup>1</sup>, Neva Livia Yusuf<sup>2</sup>, Arif Wahyu Nur Kholid<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: bambang\_jatmiko65@yahoo.com\*

### ***Abstract***

*The study aims to examine the appropriateness of compensation and the effect of internal control effectiveness as mediating variable in influencing compliance to accounting rules on the accounting fraud tendencies. This is quantitative study which used a questionnaire survey. The subject of this study is Local Government Organizations (LGO) located in Kotabaru, South Borneo. Hypotheses testing was conducted by employing Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) technique. This study find that the appropriateness of compensation and internal control effectiveness have positive effect on the accounting fraud tendencies of LGOs. In addition, compliance to accounting rules have positive effect on internal control effectiveness but internal control effectiveness cannot mediate the relationship between compliance to accounting rules and the accounting fraud tendencies significantly.*

*Keywords: Accounting Fraud Tendencies; Compliance to Accounting Rules; Compensation; Internal Control Effectiveness*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian kompensasi dan pengaruh efektivitas pengendalian internal sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner survei. Subyek penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang berada di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Studi ini menemukan bahwa kesesuaian kompensasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu, kepatuhan terhadap aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal tetapi efektivitas pengendalian internal tidak dapat memediasi hubungan antara kepatuhan terhadap aturan akuntansi dan kecenderungan kecurangan akuntansi secara signifikan.

**Kata Kunci:** Kecenderungan Kecurangan Akuntansi; Kepatuhan terhadap Aturan Akuntansi; Kompensasi; Efektivitas Pengendalian Internal

\* Corresponding author's e-mail: : bambang\_jatmiko65@yahoo.com  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

## 1. PENDAHULUAN

Skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 89 dari 180 negara yang diukur tingkat korupsinya, masih tertinggal dari Brunei, Malaysia, dan Singapura dalam masalah pemberantasan korupsi (Transparency.org, 2018). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus yang melibatkan banyak perusahaan dan organisasi, termasuk instansi swasta dan/atau pemerintah. Seperti pada survei integritas pada 2014 yang dilakukan KPK, kasus korupsi pengadaan Al-Quran menempatkan Kementerian Agama pada peringkat terbawah kategori pelayanan publik. Kerugian keuangan negara akibat korupsi pengadaan Al-Quran sebesar 27,056 miliar rupiah pada September 2012. Selain itu kasus korupsi Kementerian Dalam Negeri terkait proyek e-KTP dan program Nomor Kependudukan Nasional (NIK) serta pemutakhiran data kependudukan pembuatan e-KTP berbasis NIK tahun 2010 untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah (Fadhil, 2018)

Pada bulan Juni 2015 terjadi penyalahgunaan aset di Kotabaru, Kalimantan Selatan yang melibatkan bupati Kotabaru yaitu melakukan penyalahgunaan terkait pemberian izin pengelolaan tambang di kawasan Kalimantan Selatan. Penyalahgunaan ini berupa pemerasan terhadap PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk untuk melancarkan izin pertambangan. Total hasil yang diterima dari hasil penyalahgunaan aset ini diduga mencapai Rp 17 miliar. BPK RI menemukan total 13.969 kasus kerentanan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp. 56,98 triliun. Dari 13.969 kasus, 4.589 ditemukan tidak patuh, mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kurangnya pendapatan sebesar Rp. 10,74 triliun (BPK RI, 2018). Dari fenomena tersebut, terlihat jelas bahwa fraud merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Akan tetapi fraud dapat dideteksi dan diminimalisir atau dicegah. Dalam mendeteksi fraud, ada tiga teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebabnya. Ada teori fraud triangle, fraud diamond dan *fraud star*. (Clinard & Cressey, 1954) memperkenalkan konsep fraud triangle dengan tiga kriteria yang selalu ada dalam tindakan fraud yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi. (Umar, 2017) mengedepankan konsep fraud star dengan menambahkan kurangnya integritas. Oleh karena itu, Fraud Star merupakan penyempurnaan dari teori fraud.

Kesesuaian kompensasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, karena faktor ini penting untuk suatu organisasi. Kompensasi haruslah diberikan secara adil dan merata sesuai dengan apa yang sudah individu lakukan terhadap pekerjaan yang ia kerjakan. Jika kompensasi yang diberikan itu sudah sesuai, maka karyawan pun akan bekerja lebih baik lagi dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun sebaliknya, jika kompensasi yang diberikan itu tidak sesuai, maka hal ini akan menyebabkan karyawan tidak bekerja sesuai dengan peraturan yang ada dan akan berpotensi terjadinya tindakan fraud. Penelitian yang dilakukan (Trisna Ayu Oktavia et al., 2018) menghasilkan bahwa kesesuaian kompensasi

berpengaruh negatif terhadap tindakan fraud. Hal ini membuktikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai maka tingkat kecenderungan melakukan fraud dapat ditekan dan mampu memotivasi karyawan. Namun penelitian (Cendikia et al., 2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini tentu mengindikasikan bahwasanya kesesuaian kompensasi tidak mampu mengurangi ataupun meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dalam hal ini adalah ketaatan aturan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, merupakan pertanggungjawaban atau kewajiban aparat dalam menjalankan tugasnya untuk menginformasikan keuangan desa secara transparan dan akuntabel (Adelin & Fauzihardani, 2013). Sehingga diperlukan aparatur yang menaati dan mengimplementasikan aturan akuntansi yang berlaku di pemerintahan daerah atau SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah, sehingga semua pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan terhindar dari tindakan kecurangan (Jumantoro et al., 2019).

Arthana (2019) menemukan bahwa Kesesuaian Kompensasi dan penegakan aturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud. Akan tetapi, dengan (Deasri & Utama, 2022; Putri & Laksmi, 2019; Shintadevi, 2015; Trisna Ayu Oktavia et al., 2018) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud. Selain itu, Septiani & Diansari, (2019) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal mampu mengurangi tindakan kecenderungan Akuntansi. Penelitian ini penting dilaksanakan karena terdapat inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara Teori dengan hasil temuan penelitian sebelumnya maka penelitian ini dimaksudkan menutup kesenjangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan pengaruh Pengendalian Internal dalam memediasi pengaruh tidak langsung ketaatan aturan akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Penelitian ini memiliki keterharuan dalam menggunakan Teori Fraud Triangle dalam menjelaskan fenomena dan mengembangkan model penelitian dengan menggunakan variabel Pengendalian Internal sebagai pemediasi serta penggunaan metode SEM-PLS dalam menganalisis data.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Fraud Triangle**

Kecurangan akuntansi dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, seperti yang dirinci oleh (Clinard & Cressey, 1954), yang menyebutkan Teori Fraud Triangle, yang menyatakan bahwa aktivitas penipuan dihasilkan oleh tiga variabel:

tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (razionalization). Pressure (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan kecurangan. Tekanan dapat mencakup menjadi satu hal yaitu seperti gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Bukan hanya hal keuangan namun non-keuangan juga dapat menjadi faktor pendukungnya. Menurut SAS No. 99, seperti financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets ini merupakan empat jenis keadaan stres yang berbeda yang dapat menyebabkan penipuan. Opportunity (peluang) adalah skenario yang menciptakan jendela peluang terjadinya fraud. Ini biasanya karena kurangnya kontrol internal, pemantauan, atau penyalahgunaan wewenang. Jika dibandingkan dengan elemen lain dari diamond penipuan, peluang adalah yang paling mungkin dikurangi melalui penerapan sistem, prosedur, dan identifikasi awal penipuan. Rationalization (rasionalisasi) yaitu rasionalisasi adalah sikap, karakter, atau nilai-nilai etis yang membenarkan pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang ada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka mendapatkan alasan yang rasional dalam melakukan tindakan tersebut.

### **Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) atau penipuan yang marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menarik perhatian berbagai media di Indonesia dan di seluruh dunia. Thoyibatun, (2012) menyatakan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diartikan dengan adanya tindakan, kelicikan, pemalsuan, dan kebijakan yang tidak semestinya dilakukan secara sengaja dalam menyajikan laporan keuangan serta pengelolaan aset organisasi yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dan membuat pihak lain merasa dirugikan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2014) mengklasifikasikan terdapat tiga jenis perbuatan kecurangan, yaitu: Korupsi, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri atau suatu korporasi yang memberikan dampak kerugian bagi negara. Penyalahgunaan aset, Penyalahgunaan aktiva biasanya dilakukan pada tingkat hierarki organisasi yang lebih rendah. Namun, dalam beberapa kasus manajemen puncak terlibat dalam pencurian aktiva perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajemen memiliki kewenangan dan kendali yang lebih besar atas aktiva organisasi. Pernyataan palsu, merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh petinggi instansi dengan tujuan untuk menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dengan cara merekayasa laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

### **Kesesuaian Kompensasi**

Kesesuaian kompensasi dapat diartikan sebagai balas budi yang berbentuk dalam gaji, bonus, upah, insentif, ataupun tunjangan yang lainnya yang diterima oleh karyawan atas kinerja dan kontribusi yang telah diberikan (Arthana, 2019).

Zhou et al., (2018) menjelaskan Kompensasi dapat berbasis tunai, termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, dan bonus kinerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya dan juga sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan lainnya di waktu yang akan datang. Bagi karyawan, kesesuaian kompensasi sangat penting untuk memotivasi kinerja supaya lebih baik. Tentu kompensasi yang diberikan kepada karyawan haruslah sesuai dengan kontribusi yang dilakukan. Kesesuaian kompensasi ini dapat mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dan selalu ingin terus berusaha untuk bekerja lebih baik untuk organisasinya (Trisna Ayu Oktavia et al., 2018).

### **Ketaatan Aturan Akuntansi**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga yaitu salah satunya karena mereka tidak patuh terhadap aturan akuntansi yang berlaku. Dalam suatu instansi wajib menaati aturan akuntansi karena jika laporan keuangan tidak sesuai atau mematuhi aturan akuntansi yang berlaku, maka hal ini dapat memicu perilaku tidak etis yang dilakukan pegawai dan menyebabkan kecurangan akuntansi. Menurut Rahmawati, (2012), aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Aturan akuntansi diformulasikan untuk dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi, ada aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyampaian laporan keuangan yang mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh IAI. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) antara lain: Tanggung jawab penerapan; Kepentingan publik; Integritas; Obyektivitas; Kehati-hatian; Kerahasiaan; Konsistensi; Standar teknis.

### **Efektivitas Pengendalian Internal**

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006, pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan organisasi untuk menciptakan dan memberikan keyakinan yang memadai dengan tujuan mencapai efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap hukum yang telah berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan. Salah satu unsur yang mempengaruhi adanya kecurangan akuntansi dan perilaku etis adalah efektivitas pengendalian internal (Chalmers et al., 2019). Kontrol internal yang lemah dapat memungkinkan seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis, seperti penipuan akuntansi, yang dapat merugikan organisasi atau institusi. Pengendalian internal seharusnya menjaga perilaku tidak etis seminimal mungkin, terutama ketika menyangkut tindakan penipuan akuntansi di lembaga atau lembaga yang merugikan lembaga atau organisasi (Elbannan, 2009; Rahmawati et al., 2022). COSO, (1994) Pengendalian Internal terdapat lima komponen atau indikator, yaitu lingkungan pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; dan Pemantauan.

Putri & Laksmi, (2019) menyatakan bahwa salah satu penentu perilaku seseorang dalam suatu lembaga/organisasi dipengaruhi oleh kesesuaian kompensasi yang diberikan. Kecurangan akuntansi dilakukan karena didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang diterimanya. Dengan adanya sistem kompensasi yang sesuai ini diharapkan dapat membuat seseorang merasa tercukupi sehingga seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi termasuk melakukan perbuatan fraud (Shintadevi, 2015). Semakin sesuai kompensasi yang diterima oleh pegawai maka kinerja pegawai pun akan lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tindakan pencegahan fraud pun akan semakin baik. (Pramudita et al., 2013) menemukan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai itu sesuai maka akan menurunkan kecenderungan melakukan fraud. Zhou et al., (2018) menjelaskan bahwa kompensasi yang tidak sesuai dapat mempengaruhi motif seseorang untuk melakukan kecurangan. Sejalan dengan (Deasri & Utama, 2022; Putri & Laksmi, 2019; Shintadevi, 2015; Trisna Ayu Oktavia et al., 2018) yang menemukan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap fraud. Jika aparaturnya menerima kompensasi sesuai dengan hasil kinerja maka kemungkinan melakukan tindakan kecurangan akan semakin rendah.

***H<sub>1</sub>: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan.***

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagaimana dinyatakan dalam PSA No. 69 (IAI, 2001:319.2) “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga kelas tujuan berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Sejalan dengan Deasri & Utama (2022), Arthana (2019), Cendikia et al., (2016), Dewi & Ratnadi (2017). Prapnalina Chandra et al. (2015) Putri & Laksmi (2019) Shintadevi (2015) bahwa sistem pengendalian internal yang baik akan mengurangi tingkat kecurangan akuntansi dan dengan sistem pengendalian internal yang efisien maka peluang untuk melakukan tindakan fraud juga akan semakin sempit. internal di dalam suatu institusi.

***H<sub>2</sub>: Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.***

Meningkatkan ketaatan pada aturan akuntansi akan mewujudkan informasi akuntansi secara objektif, akurat dan berkualitas serta terhindar dari informasi yang manipulatif (Adelin & Fauzihardani, 2013). Dalam Teori stewardship aparaturnya sebagai steward akan berfokus pada kepentingan bersama dan tujuan organisasi serta menjalankan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Sutaryo & Sinaga, 2018). Oleh karena itu, semakin patuh dalam mengimplementasi aturan akuntansi, maka risiko salah saji

dapat diminimalisir dan keandalan informasi akuntansi akan meningkat. Sehingga dengan meningkatnya ketaatan aturan akuntansi maka Efektivitas Pengendalian Internal akan meningkat. Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Rahmawati, (2012) aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga dengan menaati aturan akuntansi sesuai dengan standar yang telah dibuat akan meningkatkan kualitas Pengendalian Internal Pemerintah

*H<sub>3</sub>: Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal.*

Sistem pengendalian internal mendukung terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi, yang bertujuan untuk mencapai keandalan laporan keuangan (Hardiningsih et al., 2020). Afiah and Azwari, (2015) menemukan ke tidak andalan atas informasi laporan keuangan karena lemahnya sistem pengendalian internal entitas. (Elbannan, 2009) menyatakan bahwa implementasi pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi laporan keuangan dan peran penilaian kualitas informasi. (Doyle et al., 2007) menyatakan bahwa Pengendalian internal yang kuat dapat dilihat dari kualitas informasi keuangan perusahaan. Pengendalian internal yang baik maka risiko salah saji dan kemungkinan tindakan kecurangan akan terminimalisir sehingga bukti audit yang dibutuhkan juga semakin sedikit.

Pengimplementasian aturan akuntansi secara baik akan mendukung terwujudnya akuntabilitas, maka pemerintah daerah harus mengikuti prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Menurut Teori Fraud Triangle, salah satu faktor terjadinya kecurangan karena peluang (opportunity), dan rasionalisasi (razionalization). Ketaatan dalam menjalankan aturan akuntansi maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, sehingga peluang dan rasionalisasi untuk berbuat curang akan semakin rendah. Selain itu dipandang dari Teori stewardship aparatur akan bertindak sesuai kepentingan bersama dan tujuan organisasi serta menjalankan peraturan yang berlaku.

*H<sub>4</sub>: Ketaatan Aturan Akuntansi secara tidak langsung berpengaruh negatif signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi melalui Efektivitas Pengendalian Internal.*

### 3. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah kabupaten Kotabaru memiliki satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan Kantor dan Kecamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD yang ada di lingkup Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan metode sampling rasional. Pengambilan sampel rasional adalah metode pengambilan sampel yang secara sengaja memenuhi persyaratan pengambilan sampel yang diperlukan, sedangkan pengambilan sampel non-probabilitas adalah pendekatan pengambilan sampel di mana setiap anggota tidak diambil sampelnya pada tanggal yang sama.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan survei yaitu menggunakan data primer dari kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini yaitu model skala likert 1-5 mulai dari (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

Kecenderungan kecurangan akuntansi, dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber penipuan baik berupa pemalsuan atau menyembunyikan bukti-bukti transaksi, penyajian informasi dan laporan keuangan yang tidak benar (Thoyibatun, 2012). Indikator Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sejalan dengan (Prapnalina Chandra et al., 2015) yang dikembangkan oleh Association of Certified Fraud Examination (ACFE) untuk mengukur fraud dapat menggunakan indikator: (1) kecurangan laporan keuangan, (2) penyalahgunaan asset, dan (3) korupsi.

Kesesuaian kompensasi. Trisna Ayu Oktavia et al., (2018) Kompensasi merupakan imbalan kuantitatif (Gaji Bonus Tunjangan dsb) atas kinerja seseorang agar bergerak sesuai dengan visi misi. Pengukuran ini menggunakan instrumen yang dibuat oleh Shintadevi, (2015), dikembangkan dari Veitzhal Rivai (2011) yang terdiri dari enam indikator untuk mengukur kesesuaian kompensasi yaitu: 1. Kesesuaian kompensasi dengan pekerjaan; 2. Kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan; 3. Kesesuaian promosi dengan prestasi kerja; 4. Kesesuaian sistem manajemen dengan penyelesaian tugas; 5. Kesadaran pribadi atas tanggung jawab penyusunan laporan keuangan; dan 6. Kesesuaian antara tanggung jawab penyusunan laporan keuangan dengan keahlian.

Ketaatan aturan akuntansi adalah aturan tentang pelaporan keuangan yang berpedoman pada PSAK yang dikeluarkan oleh IAI. Variabel ini diukur dengan tujuh item pertanyaan. Instrumen ini dikembangkan oleh Sukmawati (2016).

Efektivitas Pengendalian Internal. Sistem pengendalian internal digunakan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan menghasilkan peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Kewo, 2017). UU No 15 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian internal diukur dengan 5 indikator yaitu a) Lingkungan Pengendalian, b) Penilaian Risiko, c) Kegiatan Pengendalian, d) Informasi dan Komunikasi, dan e) Pemantauan.

Model struktural dalam penelitian ini, menggunakan structural equation model (SEM) dengan menggunakan regresi partial least square (PLS). Penelitian dengan sampel yang lebih kecil, tetapi sifat populasi menentukan situasi di mana ukuran sampel yang kecil dan dapat diterima maka penelitian dapat menggunakan PLS-SEM dalam menganalisis data (J. F. Hair et al., 2021; Rigdon, 2016).

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah 100 pegawai SKPD yang ada di lingkup Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di lingkup SKPD Kabupaten Kotabaru sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 57 responden dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 43 responden.

Sebelum melakukan uji hipotesis, penelitian ini menguji model penelitian terlebih dahulu. Standar penilaian outer model terdiri dari validity dan reliability tests. Validity test terdiri atas convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity menggunakan nilai outer loading dengan setiap indicator menunjukkan nilai lebih dari 0.5 (lihat Table 1). J. F. J. Hair et al., (2010) menyatakan bahwa indikator yang tidak memenuhi persyaratan kurang dari 0,5 harus dihapus, maka KKA 3, KKA 5, KAA 2, KAA 4, KAA 5, KAA 6, KAA 7, KPI 2, dan KPI 5 dieliminasi. Composite reliability berbagai dimensi lebih tinggi dari 0,7; dan Average Variance Extracted (AVE) lebih tinggi dari 0,5 tetapi penelitian ini dapat menerima 0,4. Karena Fornell dan Larcker mengatakan bahwa jika AVE kurang dari 0,5, tetapi reliabilitas komposit lebih tinggi dari 0,6, validitas konvergen konstruksinya masih memadai (Fornell & Larcker, 1981).

(J. F. Hair et al., 2017) menetapkan validitas diskriminan, akar kuadrat dari setiap AVE konstruk harus lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lainnya (lihat Tabel 1 untuk nilai AVE dan Tabel 2 untuk nilai Discriminant Validity). Berdasarkan Tabel 1 dan 2 maka Validitas diskriminan penelitian ini dapat terbangun. Setelah selesai uji reliabilitas dan validitas dalam pengukuran model PLS, selanjutnya adalah pengujian hipotesis penelitian.

Koefisien  $R^2$  adalah korelasi kuadrat dari nilai aktual dan prediksi dan, dengan demikian, mencakup semua data yang telah digunakan untuk estimasi model untuk menilai kekuatan prediksi model, ini mewakili ukuran kekuatan prediksi dalam sampel (Rigdon, 2012; Sarstedt et al., 2014). Koefisien determinasi yang disesuaikan ( $Adj-R^2$ ) dapat digunakan sebagai kriteria untuk menghindari bias terhadap kompleks model. Kriteria ini dimodifikasi sesuai dengan jumlah konstruksi eksogen relatif terhadap ukuran sampel (J. F. Hair et al., 2017). Berdasarkan table 3, nilai  $Adj-R^2$  penelitian ini adalah 0,118 atau 11,8% maka termasuk dalam kategori lemah. Nilai  $Adj-R^2$  sebesar 11,8% artinya variable penelitian ini mampu menjelaskan kemungkinan kecurangan akuntansi sebesar 11,8% dan sisanya 88,2% variabel lain di luar penelitian ini.

**Table 1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

<b>Konstruk</b>	<b>Indikator</b>	<b>Loading</b>
<b>Kecenderungan Kecurangan Akuntansi - CA: 0,496; CR: 0,737; AVE: 0,486</b>		
KKA 1	Agar saldo instansi ini tampak lebih besar, maka wajar bila pimpinan bagian akuntansi/keuangan di organisasi ini memperkecil biaya-biaya yang tercatat dalam pembukuan organisasi.	<b>0.593</b>
KKA 2	Bagi pimpinan keuangan di organisasi ini, demi mengamankan posisi pimpinan lembaga adalah wajar bila catatan dan dokumen penyuaapan kepada pejabat pemerintah dihilangkan dari pembukuan.	<b>0.740</b>
KKA 4	Pimpinan bagian keuangan di perusahaan ini, sepatutnya berusaha untuk tidak menerima berbagai pembayaran fiktif yang ada di organisasi.	<b>0.747</b>
<b>Ketaatan Aturan Akuntansi - CA: 0.495; CR: 0.795; AVE: 0.661</b>		
KAA1	Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi ini perlu mempertimbangkan kepentingan pengguna laporan keuangan sebagai skala prioritas.	<b>0.873</b>
KAA 3	Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di tempat saya bekerja ini harus berusaha membebaskan diri dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain yang berbanding terbalik dengan ketentuan akuntansi	<b>0.748</b>
<b>Kesesuaian Kompensasi - CA: 0,807; CR: 0,853; AVE: 0,492</b>		
KK 1	Tidak sesuai gaji yang saya terima dengan apa yang telah saya kerjakan.	<b>0.647</b>
KK 2	Insentif yang diberikan instansi kepada Saya sudah sesuai dengan hasil kerja.	<b>0.745</b>
KK 3	Tidak mendapatkan bayaran di luar jam kerja (libur, cuti tahunan, dan cuti hamil) oleh instansi.	<b>0.709</b>
KK 4	Tunjangan kinerja yang saya peroleh sudah sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan.	<b>0.723</b>
KK 5	Instansi tempat Saya bekerja memberikan asuransi sosial tenaga kerja untuk Saya dan keluarga Saya.	<b>0.698</b>
KK 6	Fasilitas-fasilitas (ruangan kantor, tempat ibadah, tempat parkir) yang disediakan oleh instansi sesuai dengan kebutuhan saya.	<b>0.682</b>
<b>Efektivitas Pengendalian Internal - CA: 0,620; CR: 0,783; AVE: 0,552</b>		
KPI 1	Tidak penting menghiraukan penerapan wewenang dan tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan	<b>0.577</b>

KPI 3	Pemeriksaan fisik atas kekayaan (kas, persediaan dan lain-lain) hanya dilakukan pada saat diperlukan.	<b>0.768</b>
KPI 4	Sistem akuntansi tidak mampu mencatat seluruh informasi kegiatan operasional instansi.	<b>0.857</b>

**Ket: CA: Crounbach's Alpha; CR: Composite Reliability; AVE: Average Variance Extracted.**

**Table 2 Discriminant Validity**

Konstruk	KKA	KAA	KK	KPI
<b>KKA</b>	0,697			
<b>KAA</b>	-0,136	0,813		
<b>KK</b>	0,196	-0,092	0,701	
<b>KPI</b>	-0,289	0,159	0,142	0,743

**Table 3 Analisis Jalur dan Uji Hipotesis**

Hypothesis	Kode	Koef.	p-value	Keterangan
KK → KKA	H <sub>1</sub>	0,241	0,032**	Tidak Terdukung
KPI → KKA	H <sub>2</sub>	-0,306	0,024**	Terdukung
KAA → KPI	H <sub>3</sub>	0,159	0,100*	Terdukung
KAA → KPI → KKA	H <sub>4</sub>	-0,049	0,157	Tidak Terdukung

**Signifikan pada alpha \* 10%; \*\* 5%; \*\*\* 1%; Adj-R<sup>2</sup>: 0.118**

### **Kesesuaian Kompensasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan table 3, nilai koefisien KK sebesar 0,241 dan p-value sebesar 0,032. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, H<sub>1</sub> penelitian ini ditolak karena arah koefisien yang positif. Hasil pengujian kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi pengaruh positif dan signifikan. Hasil ini bertolak belakang dengan (Deasri & Utama, 2022; Putri & Laksmi, 2019; Shintadevi, 2015; Trisna Ayu Oktavia et al., 2018) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi mampu mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa populasi penelitian ini yaitu pegawai SKPD yang ada di lingkup Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sifat serakah. Hal ini tercermin bahwa kompensasi yang sesuai tidak membuat kecenderungan kecurangan semakin rendah, akan tetapi kompensasi yang sesuai masih berpeluang meningkatkan kecenderungan tindakan kecurangan akuntansi.

\* Corresponding author's e-mail: : bambang\_jatmiko65@yahoo.com  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

### **Ketaatan Aturan Akuntansi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan table 3, nilai koef KPI  $\rightarrow$  KKA sebesar -0,306 dan p-value sebesar 0,024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengendalian Internal Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Oleh karena itu, H2 penelitian ini terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Adelin & Fauzihardani, 2013; Dewi & Ratnadi, 2017; Putri & Laksmi, 2019; Shintadevi, 2015; Studi Akuntansi, 2013) bahwa semakin baik pengendalian internal maka kecenderungan terjadi kecurangan akan semakin dapat diminimalisir. Sistem Pengendalian Internal yang dapat berjalan secara efektif akan mempersempit peluang seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Hal ini sejalan dengan Teori Fraud yang menjelaskan bahwa salah satu sebab seseorang melakukan Tindakan kecurangan karena terdapat peluang untuk melakukan Tindakan fraud.

Nilai koef KAA  $\rightarrow$  KPI sebesar 0,159 dan p-value 0,100. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam signifikan alpha 10%, Ketaatan Aturan Akuntansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas pengendalian Internal. Sehingga, H3 penelitian ini terdukung. Meningkatkan ketaatan pada aturan akuntansi akan mewujudkan informasi akuntansi secara objektif, akuntabel dan berkualitas serta terhindar dari informasi yang manipulatif (Adelin & Fauzihardani, 2013). Oleh karena itu, semakin patuh dalam mengimplementasi aturan akuntansi, maka risiko salah saji dapat diminimalisir dan keandalan informasi akuntansi akan meningkat. Sehingga dengan meningkatnya ketaatan aturan akuntansi maka Efektivitas Pengendalian Internal akan meningkat.

Berdasarkan Specific Indirect Effects pada Uji Jalur Table 3, nilai koef KAA  $\rightarrow$  KPI  $\rightarrow$  KKA sebesar -0,049 dan p-value sebesar 0,157. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh tidak langsung yang signifikan Ketaatan aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi melalui Efektivitas Pengendalian Internal. Walaupun dilihat dari arah koefisiennya negatif, yang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh negatif tidak langsung Ketaatan Aturan Akuntansi melalui Efektivitas Pengendalian Internal. Karena nilai p-value tidak signifikan di tingkat alpha 1%, 5% ataupun 10% maka H4 penelitian ini di tolak. Pengimplementasian aturan akuntansi secara baik akan mendukung terwujudnya akuntabilitas. Walaupun semakin patuh dalam pengimplementasian aturan akuntansi, maka risiko salah saji dapat diminimalisir dan keandalan informasi akuntansi akan meningkat dan dengan meningkatnya ketaatan aturan akuntansi maka Efektivitas Pengendalian Internal akan meningkat. Akan tetapi tidak mampu secara signifikan membuat kecenderungan Kecurangan akuntansi dapat diminimalisir. Hal ini mungkin dapat dijelaskan dengan teori agensi tentang seseorang yang dapat berperilaku oportunistis dan moral hazard. Salah satu contoh tindakan menurut teori agensi adalah memanipulasi akuntansi lewat sistem accrual (Deng et al., 2022; Majeed et al., 2022). Sehingga kemungkinan ini yang menjadi salah satu sebab tidak ditemukan hasil yang signifikan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas pengendalian Internal, kesesuaian kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Akan tetapi, penelitian ini tidak menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Pengendalian Internal mampu memediasi pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi praktis terutama untuk pemerintah Kota Baru Kalimantan Barat bahwa terdapat indikasi aparatur memiliki sifat serakah karena kesesuaian kompensasi yang telah diberikan namun masih mengindikasikan berbuat kecurangan. Serta, dengan implementasi aturan akuntansi yang baik maka akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemerintah daerah. Selain itu, implikasi teoritis penelitian ini adalah efektivitas pengendalian internal tidak dapat memediasi pengaruh tidak langsung ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, walaupun Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengendalian internal dan Efektivitas Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan populasi hanya lingkup SKPD tingkat Kota, serta belum mempertimbangkan aspek moralitas dan religiositas. Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti menyarankan untuk riset ke depan yaitu memasukkan variable moralitas dan religiositas sebagai variable moderasi ataupun variable bebas. Memperluas populasi penelitian menjadi skala Provinsi atau bahkan nasional. Serta mempertimbangkan teori-teori yang lain dalam menjelaskan fenomena kecurangan seperti Teori Agensi, Teori Atributif dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2014). *Report to The Nation on Occupational Fraud And Abuse Global Fraud Study*.
- Adelin, V., & Fauzihardani, E. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(2), 259–276.  
<https://doi.org/10.24036/WRA.V1I2.2641>
- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>

- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i1.1302>
- BPK RI. (2018). <https://www.bpk.go.id/news/penyimpangan-anggaran-naik>
- Cendikia, C. (Cita), Syahza, A. (Almasdi), & Trisnawati, F. (Fenny). (2016). Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pdam Tirta Siak Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 3(2), 1–14. <https://www.neliti.com/id/publications/202606/>
- Chalmers, K., Hay, D., & Khlif, H. (2019). Internal control in accounting research: A review. *Journal of Accounting Literature*, 42, 80–103. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.03.002>
- Clinard, M. B., & Cressey, D. R. (1954). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. *American Sociological Review*, 19(3), 362. <https://doi.org/10.2307/2087778>
- COSO. (1994). INTERNAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORK. *Order A Journal On The Theory Of Ordered Sets And Its Applications*, September 1992, 4.
- Deasri, N. K. D., & Utama, I. M. K. (2022). Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Kesesuaian Kompensasi dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2105. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i08.p11>
- Deng, K., Hu, F., Tian, G. G., & Zhong, Z. (2022). Does the disclosure of internal control deficiency matter for accrual quality? Evidence from China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 18(1), 100282. <https://doi.org/10.1016/J.JCAE.2021.100282>
- Dewi, K. Y. K., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 917–941.
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1–2), 193–223. <https://doi.org/10.1016/J.JACCECO.2006.10.003>
- Elbannan, M. A. (2009). Quality of internal control over financial reporting, corporate governance and credit ratings. *International Journal of Disclosure and Governance* 2009 6:2, 6(2), 127–149. <https://doi.org/10.1057/JDG.2008.32>
- Fadhil, H. (2018). *KPK: Negara Rugi Rp 2,3 T dari e-KTP, tapi Baru Balik Rp*

500 M. <https://news.detik.com/berita/d-4337444/kpk-negara-rugi-rp-23-t-dari-e-ktp-tapi-baru-balik-rp-500-m>

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.2307/3151312>

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *An Introduction to Structural Equation Modeling*. 1–29. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_1)

Hair, J. F., Hult, G. T., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. In *Sage*.

Hair, J. F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis : a global perspective. In *Pearson Education, Inc. (7th ed. /)*. Pearson Education.

Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223>

Jumantoro, Farida, U., & Santoso, A. (2019). PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI KERJA, BEBAN KERJA, DAN PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI SERBA USAHA ANAK MANDIRI PONOROGO. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 106–117. <https://doi.org/10.24269/ISO.V3I1.244>

Lelly Kewo, C. (2017). The Influence of Internal Control Iplementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 1–5. <http://www.econjournals.com>

Majeed, M. A., Yan, C., & Zhong, H. (2022). Do firms manipulate earnings after winning public-private partnership bids? Evidence from China. *Emerging Markets Review*, 51, 100880. <https://doi.org/10.1016/J.EMEMAR.2021.100880>

Pramudita, A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2013). ANALISIS FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA SALATIGA. *Accounting Analysis Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V2I1.1156>

Prapnalicia Chandra, D., Ikhsan Jurusan Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). DETERMINAN TERJADINYA KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD) PADA DINAS PEMERINTAH SE KABUPATEN GROBOGAN. *Accounting Analysis Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.15294/AAJ.V4I3.8308>

- Putri, M. L., & Laksmi, A. C. (2019). Analysis of the Effect of Internal Control Effectiveness, Appropriateness of Compensation, and Apparatus Morality toward Unethical Behavior and Tendency of Accounting Fraud. In *Proceeding UII-ICABE* (pp. 237–250).  
<https://journal.uui.ac.id/icabe/article/view/14721>
- Rahmawati, A. P. (2012). ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN MORALITAS MANAJEMEN TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI. *Repository Universitas Diponegoro*.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Sofyani, H., Kompetensi, ), Daya, S., Dan, M., Laporan, K., Pemerintah, K., Peran, D. :, Pengendalian, S., Sebagai, I., Jurnal, P., Akuntansi, R., Keuangan, D., Rahmawati, E., Sonita, S., Wahyu, A., Kholid, N., Sofyani, H., ... Bisnis, D. (2022). Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemediasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 330–343. <https://doi.org/10.22219/JRAK.V12I2.21791>
- Rigdon, E. E. (2012). Rethinking Partial Least Squares Path Modeling: In Praise of Simple Methods. *Long Range Planning*, 45(5–6), 341–358.  
<https://doi.org/10.1016/J.LRP.2012.09.010>
- Rigdon, E. E. (2016). Choosing PLS path modeling as analytical method in European management research: A realist perspective. *European Management Journal*, 34(6), 598–605.  
<https://doi.org/10.1016/J.EMJ.2016.05.006>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., Henseler, J., & Hair, J. F. (2014). On the Emancipation of PLS-SEM: A Commentary on Rigdon (2012). *Long Range Planning*, 47(3), 154–160. <https://doi.org/10.1016/J.LRP.2014.02.007>
- Septiani, R., & Diansari, R. E. (2019). Apakah ketaatan aturan akuntansi akan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi? *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.36067/jbis.v1i1.7>
- Shintadevi, P. F. (2015). PENGARUH KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 111–126. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V4I2.8003>
- Studi Akuntansi, P. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/663>
- Sutaryo, S., & Sinaga, D. (2018). Government Internal Control System Maturity: The Role of Internal Guidance and External Control of Local Government in

Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 1(2), 24–35.  
<https://doi.org/10.18196/JAI.190189>

Thoyibatun, S. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU TIDAK ETIS DAN KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI SERTA AKIBATNYA TERHADAP KINERJA ORGANISASI. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(2), 245–260. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2012.V16.I2.223>

Transparency.org. (2018). *Corruption Perceptions Index*.  
<https://www.transparency.org/en/cpi/2018>

Trisna Ayu Oktavia, Sayekti, Y., & Prasetyo, W. (2018). The Effect of Compensation to Detection Fraud in Village Government (Empirical Study on Sub-District of Pasirian, District Of Lumajang). *International Journal of New Technology and Research*, 4(6), 68–70.  
<https://www.neliti.com/id/publications/263040/the-effect-of-compensation-to-detection-fraud-in-village-government-empirical-st>

Umar, H. (2017). Corruption the devil. *BUKU DOSEN-2016*.  
[http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail\\_koleksi/0/BDS/judul/000000000000000088430/](http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/BDS/judul/000000000000000088430/)

Wijaya, K. D. S., Edy Sujana, S. E., Msi, A. K., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan whistleblowing terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada LPD di Kecamatan Gerokgak. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).

Zhou, F., Zhang, Z., Yang, J., Su, Y., & An, Y. (2018). Delisting pressure, executive compensation, and corporate fraud: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 48, 17–34.  
<https://doi.org/10.1016/J.PACFIN.2018.01.003>